LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK



JAKARTA, 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 25 Februari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	5
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	7
	A. Penjelasan Umum	7
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	66
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	73
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	79
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	80
VI.	Lampiran dan Daftar	81

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23, JAKARTA PUSAT 10560
TELEPON 021 4244819, 4207683, 4244691 FAXIMILE 021 4244819

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 25 Februari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA BADAN POM

Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar 0.00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp28.229.240.322,00 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp28.296.984.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 4.548.131.244,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp28.779.009,00. Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.105.225.361,00. dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp414.126.874,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 4.548.131.244,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. beban. surplus/defisit dari operasi. surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa. pos luar biasa. dan surplus/defisit-LO. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0.00. sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp27.779.165.788,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp27.779.165.788,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp1.260.594.605,00) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp29.039.760.393,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp5.378.776.315.00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp29.039.760.393,00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp28.209.115.322,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp4.548.131.244,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-2020		% thd Angg	31-Des-2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	180.022.342
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**	**0,00**	**180.022.342**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Barang	B.3	26.189.914.000	26.122.264.930	99,74	38.951.994.542
Belanja Modal	B.4	2.107.070.000	2.106.975.392	100,00	2.026.060.404
JUMLAH BELANJA		**28.296.984.000**	**28.229.240.322**	**99,76**	**40.978.054.946**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-20	31-Dec-19
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	28.779.009	14.768.570
Jumlah Aset Lancar		28.779.009	14.768.570
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.2	13.052.911.908	13.339.503.843
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.3	32.450.000	32.450.000
Aset Tetap Lainnya	C.4	563.085.650	1.457.008.326
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.5	(9.543.222.197)	(10.218.722.215)
Jumlah Aset Tetap		4.105.225.361	4.610.239.954
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.6	2.416.093.300	5.036.720.805
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainny	C.7	(2.001.966.426)	(4.282.953.014)
Jumlah Aset Lainnya		414.126.874	753.767.791
JUMLAH ASET		**4.548.131.244**	**5.378.776.315**
EKUITAS			
Ekuitas	C.8	4.548.131.244	5.378.776.315
JUMLAH EKUITAS		4.548.131.244	5.378.776.315
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**4.548.131.244**	**5.378.776.315**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	1.500.000
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**1.500.000**
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	358.390.699	405.551.272
Beban Barang dan Jasa	D.3	16.303.936.480	14.455.927.309
Beban Pemeliharaan	D.4	37.790.440	43.612.106
Beban Perjalanan Dinas	D.5	9.414.801.440	24.175.092.642
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	1.664.246.729	2.041.659.432
JUMLAH BEBAN		**27.779.165.788**	41.121.842.761
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(27.779.165.788)**	**(41.120.342.761)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.7		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		20.125.000	178.522.342
Beban Pelepasan Aset Nonlancar		1.281.532.173	1.226.685.133
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(1.261.407.173)**	**(1.048.162.791)**
Defisit Selisih Kurs			-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.500.542	3.045.220
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		687.974	880.380
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**812.568**	**2.164.840**
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(1.260.594.605)	(1.045.997.951)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(29.039.760.393)**	**(42.166.340.712)**
SURPLUS/DEFISIT LO		**(29.039.760.393)**	**(42.166.340.712)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1	5.378.776.315	5.486.654.076
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(29.039.760.393)	(42.166.340.712)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	1.193.580.900
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	0	1.193.580.900
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	28.209.115.322	40.864.882.051
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(830.645.071)	(107.877.761)
EKUITAS AKHIR	E.6	**4.548.131.244**	**5.378.776.315**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengawasi peredaran obat tradisional, produk komplemen dan kosmetika. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Entitas berkedudukan di Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, 10560.

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. Melalui peran tersebut diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berkomitmen dengan visi "*Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.*" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

A.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi Utama Badan POM berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Badan POM No 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan

k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan pasal 5 pada Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai kewenangan:

a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.1.2 Visi dan Misi Badan POM

Visi Badan POM :

Obat dan Makanan Aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadianberlandaskan gotong royong.

Misi Badan POM :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah :

- Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
- Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
- Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu;
- Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
- Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;
- Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas secara efesien dan efektif dikembangkan dan ditanamkan budaya organisasi dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- **PROFESSIONAL** : Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi.
- **INTEGRITAS** : konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- **KREDIBILITAS** : Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- **KERJASAMA TIM** : Mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik.
- **INOVATIF** : Mampu melakukan pembaharuan sesuai ilmu dan teknologi terkini.
- **CEPAT TANGGAP** : Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

A.1.3 Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam menunjang pencapaian visi, misi dan pelaksanaan sistem pengawasan di Badan POM serta mewujudkan good governance, Deputi II mempunyai tugas melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, melalui:

- Perkuatan kebijakan dan regulasi di bidang obat tradisional, suplemen
- kesehatan dan kosmetik;
- Peningkatan pelayanan publik meliputi penilaian (pre-market evaluation)
- untuk produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sebelum beredar;
- Perkuatan pengawasan post-market produk beredar untuk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

- Peningkatan dan perkuatan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat serta mendorong kemandirian pelaku usaha.

Dalam menjalankan tugasnya Deputi II menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

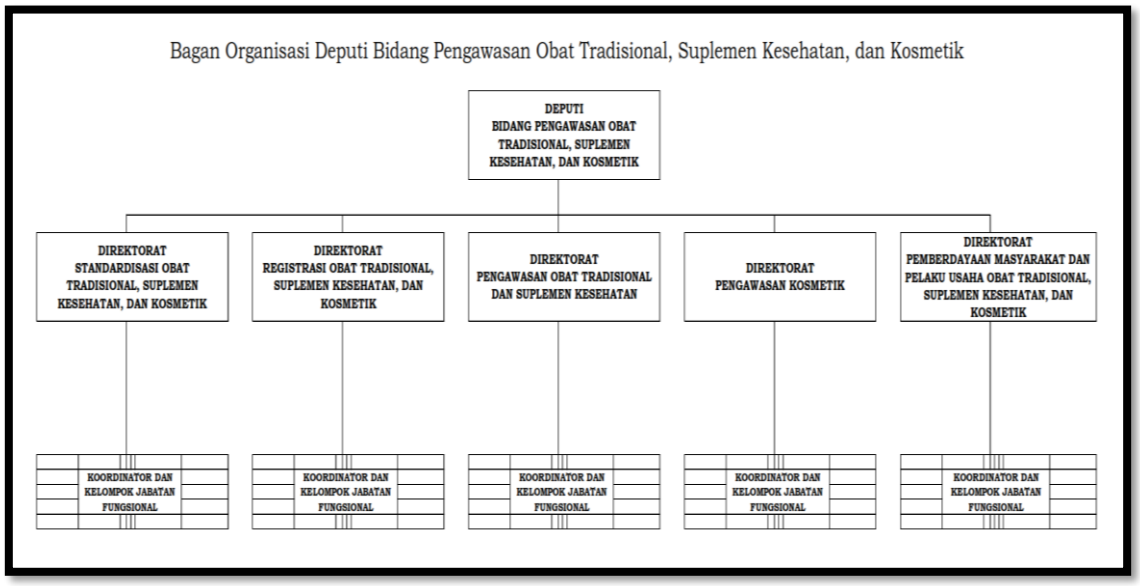
- Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi II didukung oleh 4 (empat) Direktorat

sebagai unit kerja teknis yang memiiki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit
tersebut yaitu:

- Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Direktorat Pengawasan Kosmetik

A.1.4 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komlemen dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan pendapatan-LO, pada Badan POM adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan pendapatan berdasarkan kas yang diterima adalah pendapatan diakui pada saat penerimaan kas, yang berlaku pada layanan jasa penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), penjualan baku pembanding dan hewan percobaan.
b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementrian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:

  1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:

     - Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
     - Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (Glassware); dan
     - Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.

  2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh : bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
  3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh : baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
  4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

     Sesuai dengan Perka Badan POM No 12 tahun 2017 tentang kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sample). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional

entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar :

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
    a. Harga pembelian
    b. Biaya pengangkutan
    c. Biaya penanganan
    d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
        a) Potongan harga
        b) Rabat dan lainnya yang serupa.
2. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
3. Harga Pokok Produksi Baku Pembanding ditentukan dengan menghitung komponen sebagai berikut:
    a) Bahan baku
    b) Baku primer
    c) Kemasan
    d) Biaya pengujian sesuai dengan PP tarif PNBP

e) Sertifikasi

Harga satuan pokok produksi baku pembanding merupakan penjumlahan rupiah komponen biaya dibagi output/hasil. Khusus untuk hewan percobaan harga standar/harga pokok produksi diukur berdasarkan perhitungan biaya produksi tahun sebelumnya dengan memperhitungkan biaya pemeliharaan. Harga Pokok Produksi hewan percobaan ditentukan dengan menghitung komponen sebagai berikut :

a. Biaya pakan

b. Alas hewan

c. Obat hewan

Harga satuan pokok produksi hewan percobaan merupakan penjumlahan rupiah komponen biaya selama satu tahun dibagi hasil produksi satu tahun.

4. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM.

- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
  a. alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya terlampir :
     1) alat gelas yang masih ada di gudang;
     2) alat gelas di laboratorim yang belum digunakan;
     3) alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan dan masih dalam keadaan baik.
  b. alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya terlampir
     1) alat gelas yang masih ada di gudang;
     2) alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.

- Hewan percobaan diakui setelah disapih/dipisahkan dari induknya.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  a. Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  c. Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

1) Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan

rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

2) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang

Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Alokasi dan Realisasi Anggaran

(8) Alokasi dan Realisasi Anggaran secara Total serta Pencapaian Output

Selama periode Tahun Anggaran 2020, output strategis yang telah dicapai oleh satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut :

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	Progres Capaian Output (%)
1	06.4119.001	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	4.999.810.000	5.170.165.385	103,41	1600	1.680	keputusan	100
2	06.4119.002	Permohonan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	1.817.341.000	1.855.899.189	102,12	8300	8.890	permohonan	100
3	06.4119.003	UMKM Obat Tradisional yang menerima Sertifikat CPOTB	2.119.226.000	2.143.678.748	101,15	75	75	sertifikat	100
4	06.4121.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	4.479.143.000	4.478.052.986	99,98	1100	1.207	keputusan	100
5	06.4121.002	Permohonan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	2.051.975.000	2.051.002.443	99,95	9700	10.091	permohonan	100

6	06.4121.003	UMKM Kosmetik yang menerima Sertifikat CPKB	324.373.000	324.371.041	100,00	35	37	sertifikat	100
7	06.4128.001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional yang Diselesaikan Tepat Waktu	6.000.366.000	6.029.238.864	100,48	42617	50.551	keputusan	100
8	06.4128.004	Dokumen Informasi Produk yang Diselesaikan	238.778.000	238.654.380	99,95	513	523	DIP	100
9	06.4128.005	Keputusan Hasil Evaluasi Uji Praklinik dan Uji Klinik yang diselesaikan tepat waktu	1.213.874.000	1.228.436.800	101,2	42	50	Keputusan	100
10	06.4129.001	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Disusun	2.971.803.000	2.996.292.295	100,82	7	8	Standar	100
11	06.4129.002	Permohonan Pengkajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	319.725.000	327.030.500	102,28	75	86	Kajian	100
12	06.4129.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.760.570.000	1.760.567.492	100,00	1	1	Layanan	100

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satker Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak empat kali dari DIPA awal.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2020	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain - Lain	-	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja barang	33.115.377.000	26.189.914.000
Belanja Modal	1.702.880.000	2.107.070.000
Jumlah Belanja	**34.818.257.000**	**28.296.984.000**

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Program maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KODE	PROGRAM	TA. 2020	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
06	Program Pengawasan Obat dan Makanan	34.818.257.000,00	28.296.984.000,00
		34.818.257.000,00	**28.296.984.000,00**

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Anggaran dan Program maka perubahannya adalah sebagai berikut:

PROGRAM		06 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Belanja Pegawai (51)	Anggaran Awal	**0,00**
	Anggaran Setelah Direvisi	**0,00**
Belanja Barang (52)	Anggaran Awal	**33.115.377.000,00**
	Anggaran Setelah Direvisi	**26.189.914.000,00**
Belanja Modal (53)	Anggaran Awal	**1.702.880.000,00**
	Anggaran Setelah Direvisi	**2.107.070.000,00**
Total	Anggaran Awal	**34.818.257.000,00**
	Anggaran Setelah Direvisi	**28.296.984.000,00**

Rincian Revisi Anggaran per Jenis belanja TA 2020

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Jumlah	%
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	832.933.000,00	1.041.683.000,00	208.750.000,00	25,06
Belanja Barang Non Operasional	5.027.771.000,00	8.472.105.000,00	3.444.334.000,00	68,51
Belanja Barang Persediaan	321.600.000,00	371.626.000,00	50.026.000,00	15,56
Belanja Jasa	5.048.747.000,00	6.787.091.000,00	1.738.344.000,00	34,43
Belanja Pemeliharaan	60.700.000,00	37.837.000,00	(22.863.000,00)	(37,67)
Belanja Perjalanan	15.809.482.000,00	9.479.572.000,00	(6.329.910.000,00)	(40,04)
Jumlah Belanja Barang	**27.101.233.000,00**	**26.189.914.000,00**	(911.319.000,00)	(3,36)
Belanja Modal				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.085.751.000,00	1.763.070.000,00	677.319.000,00	62,38
Belanja Modal Lainnya	110.000.000,00	344.000.000,00	234.000.000,00	212,73
Jumlah Belanja Modal	**1.195.751.000,00**	**2.107.070.000,00**	911.319.000,00	76,21
TOTAL BELANJA	**28.296.984.000,00**	**28.296.984.000,00**	-	-

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan belanja barang sebesar 3.36% (Rp911.319.000,00), terdiri atas pengurangan belanja perjalanan dan belanja pemeliharaan serta penambahan belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp655.370.000,00. Revisi DIPA juga mencakup penambahan belanja modal sebesar 76,21% Rp.911.319.000,00

Realisasi Pendapatan Rp20.125.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp20.125.000,00 dan Rp180.022.342,00. Realisasi pendapata 31 Desember mengalami penurunan sebesar 88.82%. Pendapatan dari pengelolaan BMN serta pandapatan dari penjualan ini berasal dari pemindahantanganan BMN berupa 1 paket barang inventaris dengan Risalah Lelang No. 223/28/2019 tanggal 2 November 2020. Rincian Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI TA. 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	20.125.000	178.522.342	(88,73)
Pendapatn Jasa	-	1.500.000	0,00
Pendapatan Iuran dan Denda			
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	**20.125.000**	**180.022.342**	(88,82)

Realisasi Belanja Negara Rp28.229.240.322,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.229.240.322,00 atau 99.76% dari anggaran belanja sebesar Rp28.296.984.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2020

Uraian	31-Dec-20		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	26.189.914.000	26.496.414.731	101,17
Belanja Modal	2.107.070.000	2.106.975.392	100,00
Total Belanja Kotor	**28.296.984.000**	**28.603.390.123**	101,08
Pengembalian		(374.149.801)	-
Jumlah	**28.296.984.000**	**28.229.240.322**	99,76

Dibandingkan dengan 31 Desember 2019, Realisasi Belanja 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 31.11%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada belanja barang sebesar 32.94% dan hal tersebut dikarenakan adanya Pendemi Covid 19 dikarenakan anggaran belanja modal di alokasikan untuk penangan Covid 19.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	26.122.264.930	38.951.994.542	(32,94)
Belanja Modal	2.106.975.392	2.026.060.404	3,99
Jumlah	**28.229.240.322**	**40.978.054.946**	**(31,11)**

Belanja Barang Rp26.122.264.930,00

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp26.122.264.930,00 dan Rp38.951.994.542,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 50.38 persen dari Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2019, Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada belanja perjalanan dalam negeri sebesar 52.19% hal ini dikarenakan pandemic covid 19 perjalanan dalam negeri frekuensinya berkurang dialihkan dengan daring

Perbandingan Belanja Barang
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.040.621.265	599.382.206	73,62
Belanja Barang Non Operasional	8.471.118.560	7.140.641.487	18,63
Belanja Barang Konsumsi	371.588.570	277.362.485	33,97
Belanja Jasa	6.786.344.655	6.717.898.116	1,02
Belanja Pemeliharaan	37.790.440	43.612.106	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	9.686.768.298	22.626.667.148	(57,19)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	102.182.943	1.942.389.694	
Jumlah Belanja Kotor	**26.496.414.731**	**39.347.953.242**	**(32,66)**
Pengembalian Belanja	(374.149.801)	(395.958.700)	**(5,51)**
Jumlah Belanja	**26.122.264.930**	**38.951.994.542**	**(32,94)**

Terdapat pengembalian belanja berupa :

URAIAN	31-Dec-19
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	203.564.943
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.152.000
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	52.249.915
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	102.182.943
Jumlah	**374.149.801**

B.2.1.1 Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Satker Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalokasikan belanja barang sebesar Rp2.640.272.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp2.639.212.022,00 (100%)

Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	452.493.000	451.728.995	100%
521241	Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	295.749.000	295.630.991	100%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.285.340.000	1.285.162.036	100%
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	606.690.000	606.690.000	100%
Total		2.640.272.000	2.639.212.022	100%

Kode Output	Kode Komponen	Kode Sub Komponen	Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
4119.001 Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang	051. Monitoring Efek Samping OT dan SK	A. Pembahasan Laporan Keamanan	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp2.912.000	Rp2.912.000	100 %
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp6.000.000	Rp6.000.000	100 %

Diselesaikan Tepat Waktu	52 Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Pengawasan OT dan SK	A.Bimbingan Teknis dalam Rangka percepatan tindak lanjut hasil pengawasan informasi dan promosi ot dan sk	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp4.976.000	Rp4.976.000	100%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp34.150.000	Rp34.150.000	100%
		B.	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp14.281.000	Rp14.280.290	100%
		Bimbingan Teknis dalam rangka pelaporan efek samping ot dan sk	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp31.200.000	Rp31.200.000	100%
		C. Bimbingan teknis inspektur di bidang ot dan sk (dasar dan lanjutan)	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp16.252.000	Rp16.248.000	99,98%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp114.752.000	Rp114.750.000	100%
		E. KIE Terkait Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp17.217.000	Rp17.216.001	99,99%

			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp19.200.000	Rp19.200.000	100 %
		F. Kampanye Cerdas Memilih Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Generasi Milenial	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp1.000.000	Rp1.000.000	100 %
	53 Peningkatan koordinasi dalam tindak lanjut Pengawasan OT dan SK	B	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp7.200.000	Rp7.200.000	100 %
		Monitoring dan Koordinasi pengawasan OT dan SK serta peningkatan kerja sama lintas sektor	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp205.050.000	Rp205.050.000	100 %
			521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp38.812.000	Rp38.811.648	100 %
	054 Intensifikasi pengawasan sarana OT dan SK	A Forum Komunikasi Inspektur OT dan SK	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp20.800.000	Rp20.800.000	100 %
		C Inspeksi Konprehensif dalam rangka tindak lanjut OT dan SK	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp29.700.000	Rp29.700.000	100 %

		E KIE di Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp4.089.000	Rp4.089.000	100%
	056 Intensifikasi pengawasan produk OT dan SK	B Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam manajemen sampling (Kegiatan gabungan kedeputian II dan III)	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp6.133.000	Rp6.131.500	99,98%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp17.450.000	Rp17.450.000	100%
		E Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp4.137.000	Rp4.137.000	100%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp6.100.000	Rp6.100.000	100%
	051 Sertifikasi Sarana OT dan SK	A Pemeriksanaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi COPTB pada sarana produksi OT	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp1.335.000	Rp1.274.000	95,43%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp7.200.000	Rp7.200.000	100%

		B Pembekalan bagi industri di Bidang OT dalam rangka percepatan penerapan sertifikasi cpotb	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp7.745.000	Rp7.735.000	99,87%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp37.011.000	Rp37.000.000	99,97%
		C Desk Capa sertifikasi /inspeksi CPOTB dan layanan denah onsite	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp9.150.000	Rp9.150.000	100 %
			521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp3.204.000	Rp3.185.000	99,41%
4119.002 Permohonan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Disel	052 Perkuatan Pelayanan Ekspor Impor OT dan SK	A Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan pelayanan ekspor dan impor ot dan sk	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp2.768.000	Rp2.768.000	100 %
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp9.300.000	Rp9.300.000	100 %

esaikan		B Komunikasi Implementasi kebijakan SKI Post Border suplemen kesehatan dengan pelaku usaha	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp2.484.000	Rp2.484.000	100%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp9.850.000	Rp9.850.000	100%
		C Forum komunikasi pelayanan publik ot dan sk	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp12.750.000	Rp12.750.000	100%
		D Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Serta Usaha Jamu Gendong Untuk Menjamin Keamanan Produk dengan Memenuhi Sanitasi Higiene dan Dokumentasi (Jakarta, Serang, Yogya, Sragen	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp24.129.000	Rp24.126.500	99,99%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp24.500.000	Rp24.500.000	100%
	053 Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi	C Layanan perkantoran direktorat pengawa	521131	Penanganan Pandemi COVID-19	Rp7.040.000	Rp7.011.430	99,59%

	pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	san OT dan SK					
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp28.600.000	Rp28.443.978	99,45%
		D Evaluasi Program Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK	521241	Penanganan Pandemi COVID-19	Rp36.018.000	Rp36.016.517	100 %
		H Sewa Rumah dinas jabatan Direktorat pengawasan OT dan SK	521131	Penanganan Pandemi COVID-19	Rp1.700.000	Rp1.700.000	100 %
4119.003 UMKM OT yang menerima Sertifikat CPOTB	051 Persiapan Pembinaan UMKM di Bidang OT	A Sosialisasi Tata Laksana Pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap secara Elektronik	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp5.436.000	Rp5.436.000	100 %
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp58.950.000	Rp58.950.000	100 %
		B Bimtek Sertifikasi CPOTB bertahap bagi petugas Balai	-	-	-	-	
	052 Pembinaan UMKM di Bidang OT	C KIE Obat dan Makanan secara daring	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp4.800.000	Rp4.800.000	100 %

4121.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	051 Intensifikasi pengawasan keamanan dan mutu kosmetik	C Penajaman Mutu Prioritas Sampling dan Pengujian Kosmetik di Peredaran	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp14.250.000	Rp14.250.000	100%
	052 Intensifikasi pengawasan informasi dan promosi kosmetik	A Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp14.281.000	Rp14.018.829	98,16%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp20.700.000	Rp20.700.000	100%
		B	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp12.000.000	Rp12.000.000	100%
		C Pengawalan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp2.100.000	Rp2.100.000	100%
		F Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp10.200.000	Rp10.200.000	100%
	053 Intensifikasi pengawasan sarana produksi	B Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp144.000.000	Rp144.000.000	100%

	dan distribusi kosmetik	UMKM Memenuhi Ketentuan untuk Peningkatan Daya Saing	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp8.659.000	Rp8.652.862	99,93%
	054 Intensifikasi, bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemandirian Balai Besar / Balai POM	E Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetika Beredar	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp14.300.000	Rp14.300.000	100%
		F Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp47.904.000	Rp47.897.856	99,99%
			524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp144.450.000	Rp144.450.000	100%
			521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp22.560.000	Rp22.543.500	99,93%
			521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp8.500.000	Rp8.495.600	99,95%
	055 Intensifikasi evaluasi dan monitoring efek samping kosmetik	A Perkuatan Pelaporan Efek Samping Kosmetik	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp8.650.000	Rp8.650.000	100%
		B Aksi Nasional Kosmetik Bebas Merkuri	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp45.000.000	Rp45.000.000	100%

4121.002 Permohonan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 Intensifikasi penilaian sarana produksi kosmetik	B Dukungan Percepatan Daya Saing Entrepreneur dan Start Up Kosmetik melalui Fasilitasi Pemenuhan Regulasi	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp13.942.000	Rp13.941.297	99,99%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp43.750.000	Rp43.750.000	100%
	052 Intensifikasi penilaian SKI / SKE kosmetik	C Penguatan Pengawasan Pemasukan Kosmetik Impor Post Border melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp5.500.000	Rp5.500.000	100%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp8.526.000	Rp8.525.000	99,99%
		D Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp18.900.000	Rp18.817.422	99,56%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp2.100.000	Rp2.100.000	100%
	053 Dukungan kinerja pengawasan kosmetik	A Pemenuhan Keperluan Perkantoran	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp61.560.000	Rp61.251.982	99,50%

4121.003 UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	051 Bimbingan teknis dalam rangka sertifikasi CPKB UMKM Kosmetik	C Kolaborasi Program Percepatan Pengembangan Industri UMKM Kosmetik Nasional (sumberdana PNBP)	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp60.375.000	Rp60.375.000	100%
4128.001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan tepat waktu	053 Registrasi Notifikasi Kosmetik	I Pendampingan UMKM Kosmetik	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp300.000	Rp300.000	100%
	054 Penyelenggaraan sosialisasi/ workshop/ diseminasi/ seminar/ publikasi/ penyuluhan/ bimtek/ sidang/ forum komunikasi	K Bimbingan Teknis Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Prioritas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp7.220.000	Rp7.219.600	99,99%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp35.550.000	Rp35.550.000	100%
		Q percepatan penanganan covid-19	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp19.307.000	Rp19.306.100	100%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp37.325.000	Rp37.324.078	100%
	055 Monitoring/ Evaluasi Kinerja	A Peningkatan Kualitas Layanan Publik	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp2.916.000	Rp2.915.500	99,98%

	057 Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi registrasi	G Pemenuhan Keperluan perkantoran	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp32.516.000	Rp32.515.744	100%
		H Pembekalan staff Untuk Peningkatan Kompetensi Staf	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp5.586.000	Rp5.571.200	99,74%
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp4.900.000	Rp4.900.000	100%
		K Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di masa Pandemic Covid 19	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp60.427.000	Rp60.426.796	100%
			521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp63.576.000	Rp63.563.613	99,98%
			524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp149.700.000	Rp149.700.000	100%
4128.005 Keputusan hasil evaluasi uji praklinik dan uji klinik yang diselesaikan	052 Penyelenggaraan sosialisasi/workshop/ diseminasi/ seminar/ publikasi /penyuluhan/ bimtek/ sidang/forum komunikasi/	D Pembahasan Percepatan Uji Praklinik/ Klinik dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah Covid 19	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp258.500.000	Rp258.500.000	100%
			521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp11.017.000	Rp11.000.000	99,85%

	coaching clinic/ pendampingan suplemen kesehatan dan obat tradisional						
4129.001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Disusun	056 Dukungan manajemen untuk menunjang kinerja standardisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	D Penanganan Pendemi Covid-19	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp90.850.000	Rp90.825.085	99,97%
			521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp74.646.000	Rp74.645.970	100 %
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp50.858.000	Rp50.857.124	100 %
			524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp107.490.000	Rp107.490.000	100 %
TOTAL					Rp2.640.272.000	Rp2.639.212.022	100 %

Rincian Realisasi Belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Periode 31 Desember 2020

No	Akun	Nama Barang	Nilai	Total
1	521131	**Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19**	**Rp**	**451.728.995**
		Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 154.769.779	
		Masker	Rp 37.377.100	
		Teleconference	Rp 34.397.611	
		Biaya Karantina Mandiri	Rp 1.700.000	
		Paket Data Pegawai	Rp 171.276.143	
		Alat Pelindung Diri	Rp 52.208.362	
2	521241	**Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19**	**Rp**	**295.630.991**
		Konsumsi Work From Office (WFO)	Rp 295.630.991	
3	522192	**Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-**	**Rp**	**1.285.162.036**
		Honor Narasumber pada kegiatan Web Seminar	Rp 1.285.162.036	
4	524115	**Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19**	**Rp**	**606.690.000**
		Biaya transport Work From Office (WFO)	Rp 606.690.000	
Total Realisasi				**2.639.212.022,00**

Belanja Modal
Rp2.106.975.392,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp2.106.975.392,00 dan Rp2.026.060.404,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 17.69 persen dibandingkan 31 Desember 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	T.A. 2020	T.A 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.762.975.392	1.336.525.704	100,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		2.926.700	
Belanja Modal Lainnya	244.000.000	221.423.000	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	100.000.000	465.185.000	-78,50
Jumlah Belanja Kotor	**2.106.975.392**	**2.026.060.404**	3,99
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**2.106.975.392**	**2.026.060.404**	3,99

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp1.762.975.392,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.762.975.392,00 dan Rp1.336.525.704,00. Realisasi Belanja Modal Perlatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 24.18 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2019

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Alat Angkutan	411.000.000	0	#DIV/0!
Peralatan Kantor dan Rumah	36.435.394	203.470.750	100%
Alat Studio dan Komunikasi	86.068.623	4.100.000	
Alat Laboratorium		0	
Komputer Unit dan Peralatan	1.229.471.375	1.128.954.954	100%
Jumlah Belanja Kotor	**1.762.975.392**	**1.336.525.704**	32%
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	**1.762.975.392**	**1.336.525.704**	**31,91**

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

31 Desember 2020

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	411.000.000
Mesin Ketik Elektronik	1	2.407.900
Alat Penghancur Kertas	2	5.323.000
LCD Projector	1	4.830.000
Lemari Es	1	11.250.350
Dispenser	5	12.624.144
Voice Recorder	2	2.112.000
Camera Digital	1	28.999.000
Camera Conference	1	28.600.000
Telephone Mobile	5	26.357.623
PC Workstation	35	403.864.360
P.C Unit	4	60.153.760
Laptop	40	564.981.400
Tablet PC	5	56.117.515
Printer	24	82.488.220
Scanner	9	51.689.120
External/Portable hardisk	3	4.325.000
Jumlah Belanja	**137**	**1.757.123.392**

Belanja Modal Lainyya
Rp244.000.000,00

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp244.000.000,00 dan Rp221.423.000,00. Realisasi Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp22.577.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2019. Belanja Modal Lainnya sebesar Rp.244.000.000,00 berupa :

- Pembelian Aplikasi Sistem Pendaftaran Iklan Elektronik Iklan OT dan SKk senilai Rp58.000.000,00 pada Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Pembelian Aplikasi Mobile Publicwarning Kosmetik senilai Rp98.500.000,00 pada Direktorat Pengawasan Kosmetik
- Pembelian Aplikasi Arsip Digital senilai Rp87.500.000,00 pada Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

B.5.3 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
Rp100.000.000,00

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp465.185.000. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya berupa Pengembangan Aplikasi Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (e-Mesot) di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan Rp28.779.009,00

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp28.779.009,00. dan Rp14.768.570,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jenis	31-Dec-20	31-Dec-19
Barang Konsumsi	28.779.009	14.768.570
Jumlah	**28.779.009**	**14.768.570**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik berdasarkan Berita Acara Stock Opname no.PL.03.09.4.44.09.20.03 Tanggal 31 Desember 2020. Realisasi Barang konsumsi pada rincian tersebut bukan merupakan barang konsumsi untuk penanganan Covid-19 dan tidak terdapat sisa persediaan dalam rangka penanganan Covid - 19.

Peralatan dan Mesin Rp13.052.911.908,00

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp13.052.911.908,00 dan Rp13.339.503.843,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**13.339.503.843**
Mutasi tambah:	**1.757.123.392**
Pembelian	1.757.123.392
Mutasi kurang:	**2.043.715.327**
Penghentian Aset dari Penggunaan	1.989.740.827
Transfer Keluar	53.974.500
Saldo per 31 Desember 2020	**13.052.911.908**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(9.510.772.197)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**3.542.139.711**

Mutasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp1.757.123.392,00 berupa:

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	411.000.000
Mesin Ketik Elektronik	1	2.407.900
Alat Penghancur Kertas	2	5.323.000
LCD Projector	1	4.830.000
Lemari Es	1	11.250.350
Dispenser	5	12.624.144
Voice Recorder	2	2.112.000
Camera Digital	1	28.999.000
Camera Conference	1	28.600.000
Telephone Mobile	5	26.357.623
PC Workstation	35	403.864.360
P.C Unit	4	60.153.760
Laptop	40	564.981.400
Tablet PC	5	56.117.515
Printer	24	82.488.220
Scanner	9	51.689.120
External/Portable hardisk	3	4.325.000
Jumlah Belanja	**137**	**1.757.123.392**

Terdapat mutasi kurang peralatan dan mesin senilai Rp53.974.500,00 berupa Transfer Keluar peralatan komputer berupa 1 unit server senilai Rp53.974.500,00 ke Pusat Data Dan Informasi berdasarkan BAST no. PL.03.07.43.05.20.862 Tanggal 5 Mei 2020 dan penghentian Aset dari Penggunaan Senilai Rp1.989.740.827,00 berdasarkan Surat Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker Deputi II No. PL.03.09.1.2.09.20.425 tanggal 28 September 2020

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp32.450.000,00

C.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp32.450.000,00 dan Rp32.450.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**32.450.000**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2020	**32.450.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(32.450.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**-**

Tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang atas saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 31 Desember 2020. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp563.085.650,00

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp563.085.650,00 dan Rp1.457.008.326,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian, monografi, buku pustaka, *mikrofisch* dan audio visual lainnya. Mutasi transaksi aset tetap lainnya pada tahun 2020, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**1.457.008.326**
Mutasi tambah:	**0**
Mutasi kurang:	893.922.676
Penghentian Aset dari Penggunaan	893.922.676
Saldo per 31 Desember 2020 2020	**563.085.650**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**563.085.650**

Terdapat mutasi kurang senilai Rp. 893.922.676,00 berdasarkan Surat Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker Deputi II No. PL.03.09.1.2.09.20.425 tanggal 28 September 2020.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp9.543.222.197,00)

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar (Rp9.543.222.197,00) dan (Rp10.218.722.215,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	13.052.911.908	(9.510.772.197)	3.542.139.711
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.450.000	(32.450.000)	0
3	Aset Tetap Lainnya	563.085.650	0	563.085.650
Akumulasi Penyusutan		**13.648.447.558**	**(9.543.222.197)**	**4.105.225.361**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lain – Lain Rp0,00

C.7 Aset Lain - Lain

Saldo Aset Lain – Lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**0**
Mutasi tambah:	**3.649.198.503**
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	2.883.663.503
ATB yang tidak digunakan	765.535.000
Mutasi kurang:	-3.649.198.503
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	-2.883.663.503
ATB yang tidak digunakan	-765.535.000
Saldo per 31 Desember 2020	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**0**

Terdapat mutasi kurang senilai (Rp3.649.198.503,00) berdasakan Surat Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker Deputi II No. PL.03.09.1.2.09.20.425 tanggal 28 September 2020

Aset Tak Berwujud Rp2.416.093.300,00

C.8.Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp2.416.093.300,00 dan Rp5.036.720.805,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	**5.036.720.805**
Mutasi tambah:	**344.000.000**
Pembelian	244.000.000
Pengembangan nilai aset	100.000.000
Mutasi kurang:	**2.964.627.505**
Transfer Keluar	2.199.092.505
Penghentian Aset dari Penggunaan	765.535.000
Saldo per 31 Desember 2020	**2.416.093.300**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(2.001.966.426)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**414.126.874**

Terdapat Mutasi tambah aset tak berwujud senilai Rp244.000.000,00 berupa :

1. Pembelian Aplikasi :
   - Sistem Pendaftaran Iklan Elektronik Iklan OT dan SKk senilai Rp58.000.000,00 pada Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
   - Mobile Publicwarning Kosmetik senilai Rp98.500.000,00 pada Direktorat Pengawasan Kosmetik
   - Arsip Digital senilai Rp87.500.000,00 pada Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Pengembangan Nilai Aset berupa Pengembangan Aplikasi Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (e-Mesot) di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Terdapat mutasi kurang pada asset tak berwujud pada 31 Desember 2020 berupa Aplikasi Sistem Elektronik dan Online Sistem (Aplikasi Notifikasi Kosmetik) transfer keluar ke Pusat Data Dan Informasi senilai Rp2.199.092.505,00 dengan No. BAST PL.03.07.43.05.20.862 Tanggal 5 Mei 2020 dan Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp765.535.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Badan POM No. PL.03.09.4.43.09.20.102 tentang Penghapusan BMN pada Satuan Kerja Deputi II tanggal 28 September 2020 .

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp2.001.966.426,00)

C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing dan (Rp2.001.966.426,00) dan (Rp4.282.953.014). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra

akun Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	2.416.093.300	-2.001.966.426	414.126.874
Hasil Kajian / Penelitian	0	0	0
Jumlah	**2.416.093.300**	**-2.001.966.426**	**414.126.874**
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**2.416.093.300**	**-2.001.966.426**	**414.126.874**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Ekuitas
Rp4.370.839.669,00

C.10 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp4.548.131.244,00 dan Rp5.378.776.315,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.500.000,00.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lainnya	0	1.500.000	-100%
Jumlah	**0**	**1.500.000**	**-100%**

D.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan

Rp358.390.699,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp358.390.699,00 dan Rp405.551.272,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	358.390.699	405.551.272	-11,63
Jumlah	**358.390.699**	**405.551.272**	**-11,63**

Beban Barang dan Jasa
Rp16.303.936.480,00

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp16.303.936.480,00 dan Rp14.455.927.309,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-20	31-Dec-19	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	363.694.045	517.590.812	(29,73)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	57.408.600	6.682.380	759,10
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	67.882.325	19.545.755	247,30
Beban Honor Operasional Satker	32.160.000	14.400.000	123,33
Beban Barang Operasional Lainnya	67.747.300	39.168.759	72,96
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	451.728.995	0	#DIV/0!
Beban Bahan	7.357.199.309	6.065.707.087	21,29
Beban Honor Output Kegiatan	384.970.000	286.510.000	34,37
Beban Barang Non Operasional Lainnya	433.318.260	788.424.400	(45,04)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	295.630.991	0	#DIV/0!
Beban Jasa Konsultan	97.900.000	98.450.000	
Beban Sewa	652.767.239	508.479.227	28,38
Beban Jasa Profesi	2.185.975.000	3.929.657.000	(44,37)
Beban Jasa Lainnya	2.564.540.380	2.181.311.889	17,57
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.285.162.036	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	5.852.000		
Jumlah	**16.303.936.480**	**14.455.927.309**	12,78

Beban Barang dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 sebagai berikut :

No	Akun	Nama Barang	Nilai	Total
1	521131	**Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19**	**Rp**	**451.728.995**
		Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 154.769.779	
		Masker	Rp 37.377.100	
		Teleconference	Rp 34.397.611	
		Biaya Karantina Mandiri	Rp 1.700.000	
		Paket Data Pegawai	Rp 171.276.143	
		Alat Pelindung Diri	Rp 52.208.362	
2	521241	**Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19**	**Rp**	**295.630.991**
		Konsumsi Work From Office (WFO)	Rp 295.630.991	
3	522192	**Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-**	**Rp**	**1.285.162.036**
		Honor Narasumber pada kegiatan Web Seminar	Rp 1.285.162.036	
Total Realisasi				**2.032.522.022,00**

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp37.790.440,00

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp37.790.440,00 dan Rp43.612.106,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.790.440	43.612.106	(13,35)
Jumlah	**37.790.440**	**43.612.106**	**(13,35)**

Beban Perjalanan Dinas Rp9.414.801.440,00

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp9.414.801.440,00 dan Rp24.175.092.642,00 Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengawasan. Beban Perjalanan Dinas TA 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2019 sebesar (61,06%) hal ini dikarenakan adanya pandemic covid 19 sehingga hamper semua kegiatan dilakukan secara online (daring). Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-20	31-Dec-19	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.828.690.427	6.223.296.007	-54,55
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	748.997.500	752.552.500	-0,47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.434.123.900	7.417.033.642	-53,70
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	606.690.000		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.796.299.613	7.980.298.464	**-77,49**
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	1.040.682.983	**-100,00**
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	761.229.046	**-100,00**
Jumlah	**9.414.801.440**	**24.175.092.642**	**-61,06**

Beban Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi Covid-19 sebagai berikut :

No	Akun	Nama Barang	Nilai	Total
1	524115	**Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19**	**Rp**	**606.690.000**
		Biaya transport Work From Office (WFO)	Rp 606.690.000	
Total Realisasi				**606.690.000,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.664.246.729,00

D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.664.246.729,00 dan Rp2.041.659.432,00. Beban

Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.349.655.812	1.306.037.473	3,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	**1.349.655.812**	**1.306.037.473**	**3,34**
Beban Amortisasi Software	314.590.917	735.415.709	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	206.250	(100,00)
Jumlah Amortisasi	**314.590.917**	**735.621.959**	**(57,23)**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**1.664.246.729**	**2.041.659.432**	**(18,49)**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional (Rp1.260.594.605,00)

D.7 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	**20.125.000**	**178.522.342**	-88,73%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	20.125.000	178.522.342	-88,73%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	**-1.281.532.173**	**-1.226.685.133**	4,47%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-1.281.532.173	-1.226.685.133	4,47%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**-1.261.407.173**	**-1.048.162.791**	20,34%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**1.500.542**	**3.045.220**	-50,72%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.500.542	3.045.220	-50,72%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**687.974**	**880.380**	-21,85%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	687.974	880.380	-21,85%
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**812.568**	**2.164.840**	-62,47%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**-1.260.594.605**	**-1.045.997.951**	20,52%

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp20.125.000,00 terdiri dari :

Beban Pelepasan Aset Non Lancar	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Diterima dari Entitas Lain	20.125.000	178.522.342	-88,73%
Jumlah	**20.125.000**	**178.522.342**	**-88,73%**

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari Pendapatan Pemindatanganan BMN senilai Rp20.125.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis	No. Risalah Lelang &Tanggal	No. Billing, NTPN & Tgl	Nilai
Alat Pengolah Data dan Inventaris Kantor	307/28/2020 tanggal 2 November 2020	820201105192684 / 70B1348VUA39TTNC / 5 Nov 2020	20.125.000
Jumlah			**20.125.000**

1. Beban Pelepasan Aset Non Lancar senilai (Rp1.281.532.173,00) terdiri dari :

Beban Pelepasan Aset Non Lancar	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	1.281.532.173	1.226.685.133	4,47%
Jumlah	**1.281.532.173**	**1.226.685.133**	**4,47%**

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban kerugian pelepasan aset senilai Rp1.281.532.173,00 hal ini terjadi akibat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah dengan rincian sebagai berikut

Uraian	TA 2020	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	**Rp**	**3.649.198.503**
Alat Kantor	Rp	163.182.964
Alat Rumah Tangga	Rp	137.473.740
Alat Studio	Rp	67.131.675
Alat Komunikasi	Rp	2.310.000
Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp	3.785.000
Unit Alat Laboratorium	Rp	4.164.000
Komputer Unit	Rp	1.353.175.164
Peralatan Komputer	Rp	258.518.284
Bahan Perpusatakaan Teretak	Rp	484.129.176
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Rp	409.793.500
Aset Tak Berwujud	Rp	765.535.000
Akm.Pny. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	**Rp**	**(2.367.666.330)**
Jumlah	**Rp**	**1.281.532.173**

2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional berupa pendapatan nilai persediaan karena *First In First Out* (FIFO) senilai Rp1.500.542,00 terdiri dari :

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Koreksi Otomatis Barang Konsumsi	1.500.542	3.045.220	-50,72%
Jumlah	**1.500.542**	**3.045.220**	**-50,72%**

3. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa pendapatan nilai persediaan karena *First In First Out* (FIFO) senilai (Rp687.974,00) terdiri dari :

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Koreksi Otomatis Barang Konsumsi	687.974	880.380	-21,85%
Jumlah	**687.974**	**880.380**	**-21,85%**

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp5.378.776.315

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.378.776.315 dan Rp5.486.654.076.

Defisit LO (Rp29.039.760.393,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp29.039.760.393,00) dan (Rp42.166.340.712,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Nilai Koreksi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.193.580.900,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan. koreksi atas beban. koreksi atas hibah. piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp28.209.115.322,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-

masing sebesar Rp28.209.115.322,00 dan Rp40.864.882.051. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	28.229.240.322
Diterima dari Entitas Lain	(20.125.000)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**28.209.115.322**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020. DDEL sebesar (Rp20.125.000) sedangkan DKEL sebesar Rp28.229.240.322,00)

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Pada periode hingga 31 Desember 2020 terdapat Transfer Keluar/Transfer Masuk dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Satker	Nama Barang	Nilai (Rupiah)	Nomor dan Tanggal BAST
1	Pusdatin	Software	2.199.092.505,00	PL.03.07.43.05.20.862 tanggal 5 Mei 2020
2	Pusdatin	Server	53.974.500,00	
		Jumlah	**2.253.067.005,00**	-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas. barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat hibah yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Akhir

Rp4.548.131.244,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp4.548.131.244,00 dan Rp5.378.776.315,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

F.1.1 Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik no. HK.02.02.43.04.01.20.03 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran : Dra. Indriaty Tubagus, Apt., M.Kes
Pejabat Pembuat Komitmen I : Anita Kembaren, S.Si, Apt
Pejabat Pembuat Komitmen II : Drs. Arustiyono, Apt, MPH
Pejabat Pembuat Komitmen III : Meiske Lucie Tumbol, S.Si, Apt
Pejabat Pembuat Komitmen IV : Dra. Isnaeni, Apt (M.epid)
Pejabat Penandatangan SPM : Wijiasih, SF, Apt., M.Si
Bendahara Pengeluaran : Sarmauli

Menjadi :
Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. M. Suhendri., Apt., M.Farm
Pejabat Pembuat Komitmen I : Anita Kembaren, S.Si, Apt
Pejabat Pembuat Komitmen II : Drs. Arustiyono, Apt, MPH
Pejabat Pembuat Komitmen III : Meiske Lucie Tumbol, S.Si, Apt

Pejabat Pembuat Komitmen IV : Dra. Isnaeni, Apt (M.epid)
Pejabat Penandatangan SPM : Wijiasih, SF, Apt., M.Si
Bendahara Pengeluaran : Sarmauli

F.1.2 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satker Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalami perubahan per tanggal 3 Maret 2020 yaitu:

No	Nomor Rekening	Nama Bank	Nama Rekening	NPWP
1	8100124451611000	Bank Mandiri KCP Jkt Percetakan Negara	BPG175.DEPUTI II BADAN POM RI	00.119.513.0-024.000

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 (Audited)
* Beban Amortisasi

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 30-09-2020	Beban Peny. Per 30-09-2020	Total Akm. Peny. Per 30-09-2020	Nilai Buku Per 30-09-2020
A	**Peralatan dan Mesin**						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	2.671.544.795	1.205.300.272	261.556.828	1.466.857.100	**1.204.687.695**
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7	4.386.000	4.386.000	-	4.386.000	**-**
3	Alat Pengolahan	5	1.732.962	1.516.342	216.620	1.732.962	**-**
4	Alat Kantor	5	982.460.540	1.013.576.298	(106.795.725)	906.780.573	**75.679.967**
5	Alat Rumah Tangga	5	1.563.421.644	1.355.443.909	8.147.949	1.363.591.858	**199.829.786**
6	Alat Studio	5	198.543.032	169.760.367	(43.035.085)	126.725.282	**71.817.750**
7	Alat Komunikasi	5	57.251.123	29.399.150	2.018.112	31.417.262	**25.833.861**
8	Peralatan Komunikasi Navigasi	5	1.705.000	1.463.999	(895.669)	568.330	**1.136.670**
9	Unit Alat Laboratorium	5	-	1.301.250	(1.301.250)	-	**-**
10	Alat Khusus Kepolisian	5	87.599.117	54.749.449	21.899.779	76.649.228	**10.949.889**
11	Komputer Unit	4	5.746.435.549	4.912.251.309	(725.774.729)	4.186.476.580	**1.559.958.969**
12	Peralatan Komputer	4	1.737.832.146	1.437.123.870	(91.536.848)	1.345.587.022	**392.245.124**
	Alat Sar	3	-	-	-	-	**-**
	Jumlah		**13.052.911.908**	**10.186.272.215**	**(675.500.018)**	**9.510.772.197**	**3.542.139.711**
B	**Jaringan**						
1	Instalasi Lain	20	32.450.000	32.450.000	-	32.450.000	**-**
	Jumlah		**32.450.000**	**32.450.000**	**-**	**32.450.000**	**-**
C	**Aset Tetap Lainnya**						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	20	492.086.150	-	-	-	**492.086.150**
2	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	20	70.999.500	-	-	-	**70.999.500**
3	Barang bercorak kesenian	20	-	-	-	-	**-**
	Jumlah		**563.085.650**	**-**	**-**	**-**	**563.085.650**
D	**Aset Tak BerWujud**						
1	Software Komputer	5	2.416.093.300	4.282.953.014	(2.280.986.588)	2.001.966.426	**414.126.874**
2	Hasil Kajian/Penelitian	5	0	-	-	-	**-**
	Jumlah		**2.416.093.300**	**4.282.953.014**	**(2.280.986.588)**	**2.001.966.426**	**414.126.874**
E	**Aset Lain-lain**						
1	Alat Kantor	5	-	-	-	-	**-**
2	Alat Rumah Tangga	5	-	-	-	-	**-**
3	Alat Studio	5	-	-	-	-	**-**
4	Komputer Unit	4	-	-	-	-	**-**
5	Peralatan Komputer	4	-	-	-	-	**-**
6	Software Komputer	5	-	-	-	-	**-**
	Jumlah		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total			**16.064.540.858**	**14.501.675.229**	**(2.956.486.606)**	**11.545.188.623**	**4.519.352.235**

BERITA ACARA
KESEPAKATAN ANGKA-ANGKA LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020
SATKER DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN BADAN POM TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 07/BAR/TAHUNAN/2020

Pada hari ini, Senin tanggal 5 Febuari 2021, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020**, sebagaimana Lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, sebagai bentuk atas **Laporan Keuangan Satker Tahun Anggaran 2020.**

Berita Acara ini dibuat dalam rangka penetapan angka-angka Laporan Keuangan Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Laporan Keuangan Badan POM. Penyesuaian angka-angka pada Laporan Keuangan Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Bagian Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan.

Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menyetujui akan menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ke Bagian Keuangan **paling lambat tanggal 11 Februari 2021.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Tim Verifikasi	Penyusun CRBMN	Penyusun LK Satker
Rifki Danarjanto, S.E	**Shofi Atus Syariah, S.E**	**Yoga Setiady, A.Md**
NIP. 19850211 200812 1 001	NIP. 19920523 201502 2 002	NIP. 19870127 201502 1 003

Menyetujui,
SubKoordinator SubKelompok
Substansi Akuntansi dan
Pelaporan Kuangan

Ismu Yekti Handayani
NIP. 19820527 200604 2 003

Mengetahui,
Koordinator Kelompok
Substansi Keuangan

Rafika Agusrianan, S.Si., Apt
NIP. 19800825 200501 2 001

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2015
PER 31 DESEMBER 2015

Lampiran 1
Neraca Satker : Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik
Kode Satker : 445161

AKUN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (penurunan)	
			Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0,00%
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0,00%
Kas Lainnya dan Setara kas	0	0	0	0,00%
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0	0	0,00%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0	0	0,00%
Piutang Bukan Pajak	0	0	0	0,00%
Penyisihan Piutang bukan pajak	0	0	0	0,00%
Piutang Bukan Pajak (Netto)	0	0	0	0,00%
Persediaan	28.779.009	14.768.570	14.010.439	94,87%
Persediaan Belum di register				
JUMLAH ASET LANCAR	**28.779.009**	**14.768.570**	**14.010.439**	94,87%
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan TP/TGR	0	0	0	0,00%
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0	0,00%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0,00%
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
ASET TETAP				
Tanah	0	0	0	0,00%
Peralatan dan Mesin	13.052.911.908	13.339.503.843	-286.591.935	-2,15%
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0,00%
Jalan Irigasi dan Jaringan	32.450.000	32.450.000	0	0,00%
Aset Tetap Lainnya	563.085.650	1.457.008.326	-893.922.676	-61,35%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0,00%
Akumulasi Penyusutan	-9.543.222.197	-10.218.722.215	675.500.018	-6,61%
JUMLAH ASET TETAP	**4.105.225.361**	**4.610.239.954**	**-505.014.593**	**-10,95%**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2.416.093.300	5.036.720.805	-2.620.627.505	-52,03%
Aset Lain - Lain	0	0	0	#DIV/0!
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	0	0	0	0,00%
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	-2.001.966.426	-4.282.953.014	2.280.986.588	-53,26%
JUMLAH ASET LAINNYA	**414.126.874**	**753.767.791**	-339.640.917	-45,06%
JUMLAH ASET	**4.548.131.244**	**5.378.776.315**	**-830.645.071**	-15,44%
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0,00%
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0,00%
Hibah Yang Belum Disahkan	0	0	0	0,00%
Uang Muka dari KPPN	0	0	0	0,00%
Pendapatan Diterima Dimuka			0	0,00%
JUMLAH KEWAJIBAN JGK PENDEK	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
JUMLAH KEWAJIBAN	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
EKUITAS	**4.548.131.244**	**5.378.776.315**	**-830.645.071**	**-15,44%**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**4.548.131.244**	**5.378.776.315**	**-830.645.071**	**-15,44%**

Jakarta, 5 Februari 2021

Penyusun CRBMN Satker Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik

Shofi Atus Syariah
NIP. 19920523 201502 2 002

Tim Verifikasi

Rifki Danarjanto Adisuryo S.E
NIP. 19850211 200812 1 001

Penyusun LK Satker Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik

Yoga Setiady A.Md
NIP. 19870127 201502 1 003

Lampiran II

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

063 Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Neraca Satker : Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik
Kode Satker : 445161

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan (penurunan) Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	-	1.500.000	(1.500.000)	0,00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**-**	**1.500.000**	**(1.500.000)**	**0,00**
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah	**-**	**-**	-	**0,00**
PENDAPATAN PENYESUAIAN				
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**-**	**1.500.000**	(1.500.000)	**0,00**
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	-	-	-	0,00
Beban Persediaan	358.390.699	405.551.272	(47.160.573)	-11,63
Beban Barang dan Jasa	16.303.936.480	14.455.927.309	1.848.009.171	12,78
Beban Pemeliharaan	37.790.440	43.612.106	(5.821.666)	0,00
Beban Perjalanan Dinas	9.414.801.440	24.175.092.642	(14.760.291.202)	-61,06
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	0,00
Beban Bunga	-	-	-	0,00
Beban Subsidi	-	-	-	0,00
Beban Hibah	-	-	-	0,00
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.664.246.729	2.041.659.432	(377.412.703)	-18,49
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			-	0,00
Beban Transfer			-	0,00
Beban Lain-lain			-	0,00
Beban Penyesuaian			-	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**27.779.165.788**	**41.121.842.761**	**(13.342.676.973)**	**-32,45**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(27.779.165.788)**	**(41.120.342.761)**	**13.341.176.973**	**-32,44**
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	20.125.000	178.522.342	(158.397.342)	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.281.532.173	1.226.685.133	54.847.040	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**(1.261.407.173)**	**(1.048.162.791)**	**(103.550.302)**	**0,00**
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-		-	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-		-	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**0,00**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.500.542	3.045.220	(1.544.678)	-50,72
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	687.974	880.380	(192.406)	-21,85
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**812.568**	**2.164.840**	**(1.352.272)**	**-62,47**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	**(1.260.594.605)**	**(1.045.997.951)**	**(214.596.654)**	**20,52**
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa			-	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	**-**	**-**	-	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) LO	**(29.039.760.393)**	**(42.166.340.712)**	**13.126.580.319**	**-31,13**

Jakarta, 5 Februari 2021

Tim Verifikasi

Rifki Danarjanto Adisuryo, S.E
NIP. 19850211 200812 1 001

Penyusun LK Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik

Yoga Setiady, A.Md
NIP. 19870127 201502 1 003

LAMPIRAN III

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2020 DAN 30 JUNI 2019

Satker : Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Kode Satker : 445161

AKUN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
EKUITAS AWAL	**5.378.776.315**	**5.486.654.076**	**-107.877.761**	**-1,97**
SURPLUS/DEFISIT LO	**(29.039.760.393)**	**(42.166.340.712)**	**13.126.580.319**	**-31,13**
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN				
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0,00
Penyesuaian Nilai Kewajiban	0	0	0	0,00
JUMLAH PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	**0**	**0**	**0**	**0,00**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR				
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0	1.193.580.900	-1.193.580.900	0,00
Lain-lain	0	0	0	0,00
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	**0**	**1.193.580.900**	**-1.193.580.900**	**0,00**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**28.209.115.322**	**40.864.882.051**	**-12.655.766.729**	**-30,97**
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	**(830.645.071)**	**-107.877.761**	**-722.767.310**	**669,99**
EKUITAS AKHIR	**4.548.131.244**	**5.378.776.315**	**-830.645.071**	**-15,44**

Jakarta, 5 Februari 2021

Penyusun CRBMN Satker Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik

Shofi Atus Syariah
NIP. 19920523 201502 2 002

Tim Verifikasi

Rifki Danarjanto Adisuryo S.E
NIP. 19850211 200812 1 001

Penyusun LK Satker Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik

Yoga Setiady A.Md
NIP. 19870127 201502 1 003

Lampiran IV

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

URAIAN	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
41. Penerimaan Perpajakan				0	0	0
42. Penerimaan Negara Bukan Pajak	20.125.000	0	20.125.000	180.022.342	0	180.022.342
421. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0
422. Pendapatan Bagian Laba BUMN	0	0	0	0	0	0
423. PNBP Lainnya	20.125.000	0	20.125.000	180.022.342	0	180.022.342
424. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0
43. Penerimaan Hibah	0	0	0	0	0	0
TOTAL PENDAPATAN	20.125.000	0	20.125.000	180.022.342	0	180.022.342

B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN	30 September 2020			30 September 2019		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
51	Belanja Pegawai			-			
52	Belanja Barang	26.497.014.731	374.749.801	26.122.264.930	39.347.953.242	395.958.700	38.951.994.542
53	Belanja Modal	2.106.975.392		2.106.975.392	2.026.060.404	-	2.026.060.404
54	Pembayaran Bunga Utang			-			
55	Subsidi			-			-
56	Hibah			-			-
57	Bantuan Sosial			-			-
58	Belanja Lain-lain			-			-
TOTAL		28.603.990.123	374.749.801	28.229.240.322	41.374.013.646	395.958.700	40.978.054.946

Tim Verifikasi

Rifki Danarjanto Adisuryo, S.E
NIP. 19850211 200812 1 001

Penyusun LK Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik

Yoga Setiady, A.Md
NIP. 19870127 201502 1 003

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
PERIODE TA. 2020 *UNAUDITED*

Kode BA dan Nama BA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kode E1 dan Nama E1: (01)BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (0199) INSTANSI PUSAT
Kode Satker dan Nama Satker: (445161) DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. ***Jika tidak ada data, isi dengan N/A***			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, ***agar diuraikan pada lembar lampiran***			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok *(Hardcopy)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE *face*	√		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	√		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019?	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca *Balance*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah Satker Neracanya tidak *balance* ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak *Balance* "		√	Tidak
Saldo antar Laporan	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Apakah Nilai *"Surplus/(Defisit)-LO"* di LO = Nilai *"Surplus/ (Defisit) - LO"* di LPE	√		Sama
3. Apakah Saldo *"Ekuitas Akhir"* di LPE = *"Saldo Ekuitas"* di Neraca	√		Sama
Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (*Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)*	√		Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (*Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"*	√		Tidak
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		√	Tidak
2 Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? *(Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)*		√	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi **dibayar dimuka *(prepaid)***		√	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 **Uang Muka Belanja** Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain **Yang Masih Harus Dibayar**		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (*Cek di Neraca Percobaan saldo awal*)		√	Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (*untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2020)*	√		Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 **tidak sama** saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Tidak
Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya **≤** akun 218211 ?	-	-	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		√	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap	√		Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		√	Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	-	-	Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung **≥** akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	-	-	Ya
*saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai **aset** yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon*				

Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)		
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	0
	Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?	
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	0

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan *kecuali BA.015.04 ?*		√	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBP Baru *(Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)*		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, *misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan*		√	Tidak
2. Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? *seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)*		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? *(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?*	**-**	**-**	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAAH TERKAIT BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (*cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal*)		√	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			1.500.542
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			687.974
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			812.568
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.			
5 Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar *dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07*			
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	√		Ya/Tidak
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	√		Ya

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (*saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi*)		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang ***dapat*** *bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).*

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang *sesuai Perdirjen 43/2015*	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang *(Jk.Pendek dan Jk.Panjang)* - Saldo Akhir Penyisihan Piutang *(Jk.Pendek dan Jk.Panjang)* = Beban Penyisihan Piutang LO	√		Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	**Sama**		Sama
Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111			
Pengecekan akun koreksi	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	-	-	Ya

Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.

N E R A C A

	Ya	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?	√		Tidak
Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)			
3. Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?		√	Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada
Pengecekan persediaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?		√	Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?		√	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		√	Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	**Ya/Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?		√	Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	√		Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (*Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN"*)		√	

	MENU DAFTAR BMN	Seharusnya	Ya	Tidak
1	Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		**Tidak**
2	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)	-		
3	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)	-		
4	Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		**Tidak**
5	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)	-		
6	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)	-		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Pagu Minus? *(Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")*		√	Tidak
2.	Adakah uraian jenis belanja *"tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?*		√	Tidak
Pengecekan TDK				
1.	Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2.	Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3.	Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4.	Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5.	Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6.	Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak

e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo

SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	**Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?**	√		
2.	**Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?**	√		
Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Apakah sudah dibuat Berita Acara *Stock Opname* Persediaan ?	√		Ya
2.	Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3.	Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4.	Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5.	Adakan PNBP digunakan langsung?		√	Tidak
6.	Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	√		Ya
7.	Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
8.	.....			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	**Sama**		Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	**Ya/Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	√		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	√		Ada
Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?		√	Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
9 Apakah belanja dalam rangkan penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	√		Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	√		Ya
3 Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020	√		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir **(*rumus perhitungan beban persediaan terlampir*)**	√		Ya

Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak
1. Apakah terdapat pengungkapan atas *Refocussing* kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19	√	
2. Jika terdapat *Refocussing* kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (~~kenaikan~~/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp6.521.273.000	
3 Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19		√
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		√
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	**Ada**	**Tidak**
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		√

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.	√	
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		√
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		**Ada**	**Tidak**
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan …….		√
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		√

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA,
serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LK Satker

DEPUTI II

(Yoga Setiady, A.Md)

NIP. 19870127 201502 1 003

Jakarta, 22 Januari 2021

Penelaah,

(Rifki Danarjanto Adisuryo)

NIP 19850211 200812 1 001

Menyetujui,
SubKoordinator SubKelompok
Substansi Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan

Ismu Yekti Handayani, SE, MA.

NIP. 198205272006042003

Mengetahui,
Koordinator Kelompok
Substansi Keuangan

Rafika Agusrianan, S.Si., Apt

NIP. 19800825 200501 2 001